

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ibrahim dan Abdullahi (2019) ketika perusahaan berjalan tidak baik maka timbul masalah keagenan. Dalam teori keagenan (*agency theory*) kalau kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan terpisah maka akan menimbulkan masalah keagenan. Konflik ini akan menimbulkan adanya *abuse of power* oleh manajer untuk kemakmurannya sehingga mengorbankan kepentingan pemangku lain. Menurut Ibrahim dan Abdullahi (2019) masalah keagenan akan muncul jika manajer tidak memegang 100% kekayaan atas perusahaan, sehingga mereka tidak akan memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham tetapi memaksimalkan keuntungan pribadi. Tetapi dengan adanya tata kelola perusahaan sebagai mekanisme maka akan menyatukan tujuan antara manajer dan pemegang saham untuk perusahaan yang akan mengurangi biaya keagenan. Sehubungan dengan itu adanya tata kelola perusahaan akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan, dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik akan menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Menurut Jensen dan Meckling (1976, dalam Mahrani dan Soewarno, 2018) bahwa hubungan keagenan seperti hubungan antara pemilik dengan agen, dengan mendelegasikan pembuatan keputusan kepada agen. Dalam hubungan keagenan ada konflik antara *principal* dengan *agent*. Di mana pemegang saham menuntut untuk kenaikan keuntungan dan deviden, berbeda dengan manajer sebagai agen yang ingin memenuhi kebutuhan psikologi dan keuntungannya sendiri.

Dalam penelitian Ibrahim dan Abdullahi (2019) menyatakan dalam teori keagenan semakin besar *board size* semakin efektif mengontrol manajemen dalam mengurangi dominasi dari CEO dalam *board* dan memimpin pertumbuhan kinerja perusahaan. Jadi teori ini menyarankan bahwa *larger board* dapat mengkoordinasi dan mengkomunikasikan isu. Jadi *board size* besar akan mengurangi *agency problem*, di mana *agency problem* dapat menyebabkan penurunan kinerja

keuangan. Menurut Ibrahim dan Abdullahi (2019) dengan adanya *board size* sebagai mekanisme untuk mengurangi *agency problem* akan meningkatkan kinerja keuangan karena efektif mengontrol manajemen.

Kemudian mengenai *board independence*, *agency theory* menyarankan menggunakan *independent commissioner* karena kemampuannya yang baik dalam mengontrol manajemen. Menurut Mahrani dan Soewarno (2018) menyatakan bahwa *independent commissioner* yang memiliki profesionalitas lebih tinggi akan menghasilkan keputusan lebih efektif dan efisien dalam mengawasi manajer. Menurut Mahrani dan Soewarno (2018) *Board independence* dapat mengurangi *agency problem*, yang pada dasarnya menurunkan kinerja keuangan. Jadi *board independence* sebagai mekanisme mengurangi *agency problem* dapat meningkatkan kinerja keuangan karena memiliki profesionalitas yang tinggi.

Board gender diversity sebagian besar terkait dari peran pemimpin perwakilan berbagai grup akan menyediakan keseimbangan *board* jadi tidak ada yang dominan dalam mengambil keputusan dalam *board*. *Gender diversity* dihubungkan dengan efektifitas dalam kekeliruan fungsi dari *board of directors*. Kekeliruan fungsi mungkin bisa efektif jika ada perbedaan *gender* dalam *board* yang membolehkan meluasnya jarak antara pendapat-pendapat yang ada untuk dipertimbangkan. Jadi *diversity* dalam *board* berperan untuk mengontrol fungsi dan mengurangi *agency problem*. Sehingga peran *gender diversity* akan meningkatkan kinerja keuangan karena perbedaan pendapat lebih dipertimbangkan.

Faktor lain dalam penelitian Yilmaz (2018) menyatakan bahwa *institutional ownership* sebagai mekanisme mengurangi *agency problem* berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena memiliki keputusan yang lebih obyektif. Terkait dengan masalah keagenan tentunya akan menimbulkan biaya keagenan mengenai *monitoring*, *bounding*, dan *residual loss*. Jensen dan Meckling (1976, dalam Owusu dan Weir, 2017) menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan kontrol antara manajer dengan pemegang saham akan menimbulkan biaya keagenan. Penelitian ini ingin meneliti hubungan antara kualitas tata kelola pada perusahaan *non financial* dan dampaknya pada kinerja

keuangan akan menjadi lebih baik atau buruk dan mengetahui apakah pengaruhnya antara tata kelola berpengaruh positif atau negatif pada kinerja keuangan. Ketika perusahaan memiliki tata kelola yang baik atau berdampak positif perusahaan tersebut memiliki pendapatan, keuntungan yang lebih baik dari pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk. Hal ini karena tata kelola perusahaan dapat mengatur dan mengawasi kinerja suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh adanya konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajer, dewan komisaris, *board size*, *CEO family*, ukuran perusahaan, hutang, dan biaya keagenan sekaligus menjadi ukuran untuk menilai.

Pemisahan yang terjadi antara *principal* dengan *agent* disertai perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* akhirnya bisa menimbulkan konflik kepentingan yang bisa menimbulkan biaya keagenan seperti *bonding cost* dan *monitoring cost* (Suryanto, 2017). Jadi adanya masalah keagenan akan menimbulkan pengeluaran bagi perusahaan dan akan menyebabkan perusahaan berkinerja buruk oleh karenanya akan menimbulkan biaya keagenan pula.

Menurut Sonmez dan Yildirim (2015) fenomena global mempengaruhi setiap perusahaan atau korporasi memiliki *Good Corporate Governance* (GCG) supaya tetap bertahan dalam berbagai situasi dan tantangan globalisasi pada abad ke-21. Arti "*governance*" adalah "pemerintahan", sementara *corporate governance* (CG) berarti "tata kelola perusahaan" merupakan seni dan strategi pada manajemen kunci dalam area bisnis yang menjadi penentu keberhasilan korporasi dalam mencapai kinerja keuangan yang paling baik.

Fenomena terjadi menurut Hadian (2018) yang terkait seperti PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., PT Lippo Karawaci Tbk, PT Lippo Cikarang pada kasus suap untuk proyek Meikarta dari bos Lippo dimana ketika berita penangkapan muncul saham Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), pengembangan proyek Meikarta, mengalami penurunan 240 point (14,77%) ke Rp. 1385 setelah dibuka pada level Rp. 1625. Sementara saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) juga mengalami penurunan 8 poin (2,68%) ke Rp. 290. Hal ini terjadi karena adanya tata kelola yang buruk dari perusahaan LPCK dan LPKR.

Dalam kasus pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menurut Sugianto (2019) berawal dari anak usahanya yaitu PT Indo Beras Unggul (IBU) yang telah melakukan pengoplosan beras subsidi menjadi beras premium. Karena penjualan beras merupakan sumber utama pendapatan perusahaan menyebabkan perusahaan melakukan praktik tidak etis atau curang dalam penjualan beras, yaitu dengan mengganti kemasan beras yang didapat dari subsidi dengan kemasan beras yang bermerek lebih berkualitas. Awalnya beras yang dibeli dengan harga Rp. 7000 dijual kembali dengan harga mencapai Rp. 24.000.

Sehubungan dengan kasus di atas sehubungan dengan tata kelola perusahaan, bahwa internal manajemen melakukan tindakan yang tidak terpuji untuk meraup keuntungan dengan berani mempertaruhkan reputasi perusahaan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih dan ini juga merugikan pihak lain seperti karyawan, investor, pemasok, dan lain-lain (Sugianto, 2019). Hal ini membuktikan bahwa tata kelola perusahaan juga harus mementingkan pemegang kepentingannya. Ibrahim dan Abdullahi (2019) menyatakan bahwa perusahaan sejenis ini mempunyai ciri banyak kepemilikan yang tidak mempunyai fungsi manajemen dan manajer yang tidak atau hanya mempunyai sedikit simpanan modal di perusahaan. Sebuah peraturan yang mengukur hubungan baik terkait pihak internal seperti karyawan dan anggota yang lain, maupun eksternal seperti pihak kreditur, pemerintah dan lainnya tentunya dengan hak dan kewajiban masing-masing disebut dengan tata kelola perusahaan.

Pada kasus PT Lippo Karawaci adanya dugaan kuat terkait penyuaan terhadap penerbitan izin properti dalam proyek Meikarta sehingga menyebabkan kredit negatif pada PT Lippo Karawaci Tbk dengan menggarisbawahi adanya masalah pada tata kelola perusahaan juga menyebabkan reputasi buruk yang akhirnya menghilangkan kepercayaan konsumen dan investor (Kasus Suap Meikarta Potensial Perburuk Likuiditas Lippo, 2018).

Untuk memperoleh 6 izin dalam proyek Meikarta yang merupakan proyek perusahaan properti PT Lippo Cikarang Tbk., yang dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Usaha (MSU) yang menjadi anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. hal yang tidak baik dilakukan dengan cara menyuap beberapa pejabat di Pemkab

Bekasi. Orang yang menjadi terdakwa yaitu Billy Sindoro yang menjabat sebagai Direktur Operasional Lippo Group, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan Taryudi dan Fitradjaja Purnamaselaku konsultan Lippo Group, penyusunan dilakukan oleh perwakilan Lippo Cikarang dan Lippo Karawaci secara bertahap (6 Borok Perizinan Proyek Meikarta, 2018).

Hal ini menandakan bahwa tata kelola perusahaan tersebut tidak baik. Sejalan dengan teori menurut Al-ahdal, Alsamhi, Tabash, dan Farhan (2020) tata kelola adalah sebuah sistem yang tidak hanya mempertinggi hubungan antara *stakeholders*, manajer dan investor. Tetapi juga menjamin bahwa menentukan bukti dari sumber daya selama bersaing untuk digunakan supaya tetap bertahan. Maka dari itu menarik untuk diteliti, apakah dengan adanya tata kelola yang baik bisa mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan terlebih pada perusahaan non keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Abdullahi (2019) adalah *corporate governance has positive and significant impact on financial performance*. Bahwa adanya pengaruh positif antara tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan. Jadi ketika *corporate governance* berpengaruh positif maka ROA sebagai ukuran *financial performance* menjadi meningkat.

Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya Yauri, dkk. (2013, dalam Ibrahim dan Abdullahi, 2019) menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan. Hal ini berlawanan dengan Lasisi (2017, dalam Ibrahim dan Abdullahi, 2019) menyatakan hasil dari tata kelola perusahaan pada kinerja keuangan berpengaruh negatif.

Juga pada penelitian yang dilakukan oleh Yilmaz (2018) mengindikasikan hubungan lemah tetapi signifikan untuk keseluruhan skor antara beberapa ukuran tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan dan hasil signifikan antara ROA dengan *corporate governance* pada perusahaan keuangan. Pada penelitian ini akan meneliti perusahaan non keuangan.

Menurut Ibrahim dan Abdullahi (2019) pemisahan yang terjadi antara kepemilikan dan kontrol membuat adanya berbagai kepentingan terjadi antara

manajer dengan pemegang saham di mana manajer tidak memegang kendali atas 100% kekayaan perusahaan. Hal ini akan menimbulkan tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menambah kekayaan sendiri dan biasanya dilakukan oleh manajer dengan tidak membayar deviden kepada pemegang saham. Oleh karena itu dengan adanya tata kelola perusahaan yang menjadi mekanisme untuk mengontrol kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Selain itu tata kelola perusahaan merupakan sebuah struktur dari organisasi yang terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, juga hierarki manajerial perusahaan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2014, dalam Candradewi dan Rahyuda, 2019) menyatakan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, manajemen dan pemangku kepentingan lainnya merupakan aktivitas yang saling berhubungan pada tata kelola perusahaan serta sistem tata kelola perusahaan juga harus melindungi pemegang saham dan kreditur dengan perlindungan yang efektif, supaya adanya jaminan terkait pengembalian keuntungan atas investasi mereka. Ketika pemegang saham dan kreditur terjamin maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut.

Menurut Osuoha (2013, dalam Candradewi dan Rahyuda, 2019) menyatakan bahwa memacu penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif sehingga keseluruhan aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik disebut manfaat tata kelola perusahaan. Jadi jika perusahaan memiliki kinerja yang baik hal tersebut merupakan akibat dari adanya tata kelola yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Semua perusahaan kecil maupun perusahaan besar mempunyai tata kelola yang berbeda-beda. Begitu juga pada perusahaan *non financial*. Dalam hal bisnis setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan hasil kinerja yang efektif serta mendukung peningkatan dalam perusahaan dalam segala aspek. Dengan adanya tata kelola yang baik dapat memberikan peningkatan pada kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki tata kelola yang baik berarti pengaruhnya

positif sedangkan perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk berarti pengaruhnya negatif pada kinerja keuangannya. Dengan demikian pengaruh *board size*, *board independence*, *board gender diversity* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *board size* berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan *non financial*?
2. Apakah *board independence* berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan *non financial*?
3. Apakah *board gender diversity* berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan *non financial*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Adanya pengaruh positif antara *board size* dengan kinerja keuangan pada perusahaan *non financial*.
2. Adanya pengaruh positif antara *board independence* dengan kinerja keuangan pada perusahaan *non financial*.
3. Adanya pengaruh positif antara *board gender diversity*, dengan kinerja keuangan pada perusahaan *non financial*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi penelitian agar peneliti paham mengenai pengaruh tata kelola pada kinerja keuangan suatu perusahaan sektor *non financial*.

2. Bagi Akademis

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi pembaca tentang pengaruh tata kelola perusahaan pada kinerja keuangan perusahaan *non financial*, dan supaya ada pengembangan terkait penelitian ini.

3. Bagi Investor

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan investor terkait mana perusahaan *non financial* yang memiliki prospek yang baik karena memiliki tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan pembagian sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan rerangka penelitian.

Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan sampel, dan teknis analisis data.

Bab 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, hasil analisa data, dan pembahasan.

Bab 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan yang berisi penjelasan mengenai hal-hal yang belum dilakukan peneliti dalam penelitian, lalu yang terakhir saran untuk akademis dan praktis.